



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025—2026
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dengan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LTNU), dan Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKES Indonesia)
Sifat Rapat	: Tertutup
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 April 2026
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gd. Nusantara I Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto Senayan, Jakarta.
Acara	: 1. Kebijakan dan implementasi Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PTN dan PTS 2026 2. Evaluasi SPMB 2024-2025 3. Rekomendasi SPMB 2027
Ketua Rapat	: Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (Ketua Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru/Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. 15 (lima belas) Anggota dari 22 (dua puluh dua) Anggota Panja, dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi; B. Prof Dr Thomas Suyatno (Ketua Umum ABP PTISI); C. M. Budi Djatmiko (Ketua Umum APTISI); D. Dr. Marzuki Alie, SE., MM (Ketua Dewan Pengawas APPERTI); E. Prof. Dr. dr. Jurnalis Uddin, PAK: (Ketua Dewan Penyantun APPERTI); F. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si. Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah); G. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. Rektor Universitas Islam Malang (UNISMA)-LTNU; H. Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si. Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan-LTNU; I. Prof. Dr. M Budi Djatmiko, MEI (Ketua Umum HPTKes Indonesia).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.30 WIB oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (Ketua Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI) Setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

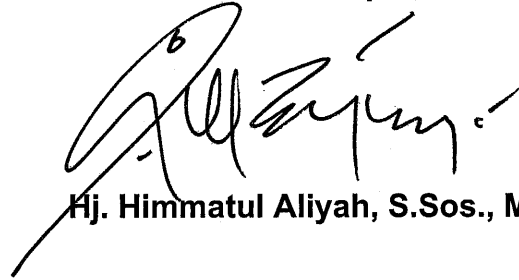
1. Panja SPMB Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU), Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes Indonesia) yang telah menyampaikan paparan mengenai evaluasi pelaksanaan SPMB dan tantangan penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS. (Bahan Paparan Terlampir) Para narasumber menyampaikan beberapa informasi dengan poin utama diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) saat ini masih menimbulkan ketimpangan ekosistem pendidikan tinggi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama dalam aspek jalur seleksi, waktu penerimaan mahasiswa, daya tampung (kuota), dan sanksi pelanggaran serta dukungan pembiayaan pendidikan.
 - b. Panjangnya jadwal seleksi penerimaan mahasiswa PTN dan banyaknya jalur seleksi yang berlapis menyebabkan PTS kehilangan momentum rekrutmen mahasiswa baru.
 - c. Perlu adanya penataan ulang sistem dan jadwal SPMB nasional dengan menetapkan batas akhir pengumuman penerimaan mahasiswa PTN paling lambat bulan Juni setiap tahun akademik, guna memberikan kepastian waktu bagi PTS dalam melakukan proses penerimaan mahasiswa baru.
 - d. Mendorong untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi nasional antara PTN dan PTS, maka untuk PTN diusulkan agar proporsi S1 sebanyak 40% dan Program Pascasarjana 60% melalui pengaturan proporsional daya tampung mahasiswa, pengendalian ekspansi program studi tertentu di PTN, serta penguatan peran PTS dalam memperluas akses pendidikan tinggi.
 - e. PTS memiliki peran strategis dalam pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya di daerah dan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga keberlanjutan PTS perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan pendidikan tinggi nasional.

- f. Mendorong agar meningkatkan dukungan terhadap peningkatan mutu PTS, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan dan mempermudah akses dana ke Pemerintah dengan tidak ada pembatasan jumlah mahasiswa, pengembangan kapasitas dosen, dukungan pembiayaan akreditasi, dan penguatan tata kelola perguruan tinggi.
 - g. Meninjau distribusi dan besaran bantuan pendidikan program KIP Kuliah, agar lebih proporsional dan menjangkau seluruh calon mahasiswa baru yang memenuhi syarat.
 - h. Memberikan kesempatan bagi PTS yang memiliki akreditasi unggul untuk dapat berpartisipasi dalam skema nasional SPMB, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan perguruan tinggi berkualitas yang lebih luas.
 - i. Berdasarkan peraturan perundangan Pemerintah daerah tidak diperkenankan memungut Pajak Bumi dan Bangunan bagi lembaga pendidikan dan mendorong Anggota Komisi X DPR RI untuk mensosialisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - j. Perlu audit anggaran dari masyarakat yang di terima oleh PTN BH dan audit anggaran dari negara yang diterima oleh PTS.
 - k. Mengusulkan agar mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 7 tahun 2020 khususnya Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 tentang Pendidikan Jarak Jauh yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
 - l. Kebijakan pendidikan tinggi perlu diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan nasional, termasuk dalam sektor strategis seperti kesehatan, guna memastikan keberlanjutan pasokan sumber daya manusia nasional yang merata dan berkualitas.
2. Bahan paparan Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI), Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPTNU), Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia (HPTKes Indonesia) menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari RDP hari ini yang substansinya menjadi rujukan dalam menyusun rekomendasi panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

Ketua Rapat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hj. Himmatul Aliyah', written over a horizontal line.

Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si.